



APBDes 2015 Terancam Mubazir

Disayangkan,
kelambanan
sosialisasi pusat
terkait pemanfaatan
dana desa.

GIANYAR, NusaBali

Para kepala desa/perbekel di Gianyar menyayangkan langkah pemerintah pusat yang lamban dalam menyosialisasikan aturan teknis pengelolaan penggunaan dana desa sesuai UU Desa. Kelambanan ini mengakibatkan sejumlah kegiatan yang tertuang dalam APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa) 2015 ditetapkan semua desa, terancam mubazir.

Kondisi itu terungkap dalam acara 'Sosialisasi Kebijakan Dana Desa' di Balai Budaya Gianyar, Kamis (6/8). Kegiatan dihadiri Sekjen Kementerian Keuangan RI Dr Hadiyanto SH LLM CITP, Kasi Bagi Hasil Pajak 1 Kementerian Keuangan Jaka Sucipta, dan lainnya. Sosialisasi diikuti 64 perbekel, 7 lurah, sekdes, dan seklur (sekretaris lurah) ini juga dihadiri anggota Komisi XI DPR RI asal PDIP Perjuangan Gusti

Agung Wirajaya.

"Kami selaku kades dibuat bingung dengan seringnya terjadi perubahan aturan. Padahal, sebagai kades kami tak hanya mengurus dana desa. Urusan kami banyak," ujar Perbekel Kenderan, Tegallalang, Dewa Made Raka, saat sesi tanya jawab.

Ia menanyakan, selama ini sudahkah ada desa yang layak

dijadikan contoh untuk penerapan penggunaan dana desa sesuai UU Desa ini. Senada itu, Perbekel Serongga, Gianyar AA Gde Indrayana menyayangkan kelambanan sosialisasi pejabat pusat terkait pemanfaatan dana desa. "Masalahnya, kami di desa telah menetapkan APBDes, diantaranya ada kegiatan membangun kantor desa. Tapi, baru kami tahu kalau membangun



• NUSABALI/WILASA

Acara 'Sosialisasi Kebijakan Dana Desa' di Balai Budaya Gianyar, Kamis (6/8).

kantor desa dengan dana desa ini seizin bupati," ujarnya.

Hal sama juga diungkapkan Ketua Forum Perbekel/Lurah Kabupaten Gianyar yang Perbekel Desa Bona, Blahbatuh I Gusti Nyoman Gede Susila. "Kami takut kalau dana yang kami kelola ini malah berdampak hukum bagi para perbekel," jelasnya.

Kata dia, sejak pemberlakuan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, aliran dana yang dikelola desa semakin besar, namun timbul keraguan dalam pengelolaan. Oleh karena itu, dia sangat yakin dana tersebut bisa diserap dan dioptimalkan penggunaannya sepanjang ada aturan yang jelas.

Asisten I Setda Gianyar Cokorda Rai Widiarsa Pelayan mengatakan dana desa dari APBN untuk 64 desa di Gianyar 2015 mencapai Rp 19,166 miliar. Awal Mei 2015 sudah digelontorkan Rp 7,666 miliar, lanjut tahap II 40 persen dan tahap III 20 persen.

Kata dia, penting ada aturan jelas untuk menghilangkan keraguan dan penyelewengan penggunaan anggaran oleh kepala desa. Sehingga pembangunan di desa bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan dan terhindar dari kasus hukum. "Kepastian

aturan tersebut bisa menjadi motivasi bagi aparatur desa dalam merencanakan, mengelola dan mengawasi penggunaannya, sehingga RPJMDes dan APBDes yang menjadi syarat mengakses dana ini bisa ideal," terangnya.

Sekjen Kementerian Keuangan RI Dr Hadiyanto mengatakan dana yang diterima desa sudah dibuatkan aturan jelas dengan pembagian yang merata dan adil. Dana desa dari pusat pada 2015 mencapai Rp 20,766 triliun, dan naik 11 persen pada 2016 hingga dana yang akan diterima rata-rata Rp 1,4 miliar per desa.

Menurut dia, kunci pengelolaan dana desa sesuai RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan APBDes. Oleh karena itu, setiap desa wajib menerapkan APBDes dan menyiapkan SDM yang memadai. Tahap awal alokasi dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan UU Desa ini, pihak Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan PDT menyiapkan pendamping desa untuk memfasilitasi desa dalam pengelolaan dana tersebut. **Isa**

Edisi : Jumat, 7 Agustus 2015

Hal : 6



Bantuan Desa Pakraman Dicairkan Mulai 9 Agustus ✓

DENPASAR, NusaBali

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan bantuan desa pakraman atau desa adat lewat bantuan keuangan khusus untuk 2015 akan mulai dicairkan pada 9 Agustus ini setelah sempat tertunda akibat perubahan regulasi.

"Tanggal sembilan akan dikumpulkan bendesa adat dan kepala desa. Setelah sempat dipertanyakan tempo hari, besoknya SK sudah saya teken. Rupanya semua sedang proses," kata Pastika saat menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota Dewan dalam rapat pembahasan RAPBD Perubahan 2015, di Gedung DPRD Bali, Kamis (6/8).

Dalam rapat gabungan tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Nyoman Parta berpandangan keterlambatan pencairan dana BKK kepada desa pakraman, subak dan subak abian, dikawatirkan akan mengganggu proses pertanggungjawaban untuk tahun ini, termasuk pelaksanaan pasraman budi pekerti yang dibiayai dari bantuan tersebut.

Sebelumnya dalam pandangan umum Fraksi PDIP, bahkan mereka mengingatkan kepada Gubernur Bali untuk mencermati kinerja Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan stafnya yang dianggap lemah dan tidak cekatan, apabila diperlukan dilakukan mutasi karena belum mencairkan bantuan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Beratha mengatakan untuk pencairan desa pakraman, subak dan subak abian banyak kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi. Meskipun sebelumnya sudah ada fatwa dari Mendagri yang mengizinkan Bali tetap mengacu pada Permendagri No 37 Tahun 2007.



● NUSABALI/HENDRA
GUBERNUR Pastika saat rapat di Gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis (6/8).

Dewa Beratha menambahkan, BKK untuk 2015, sempat belum bisa dicairkan terkait dengan keluarnya Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. "Namun fatwa itu (dapat menggunakan PP 37-red) baru keluar akhir Mei. Kami menyosialisasikan ke sembilan kabupaten dan kota hingga 22 Juni, dan di bulan Juli itu sekitar dua minggu merupakan libur hari raya," ucapnya.

Di samping itu, pihaknya baru bisa mencairkan kalau sebelumnya ada proposal dan kelengkapan administrasi yang diajukan oleh desa pakraman. Hingga 3 Agustus 2015, dari 1.386 desa pakraman yang berhak mendapatkan dana lewat mekanisme BKK, proposal yang masuk baru dari 106 desa pakraman. Dari 106 proposal itu, berasal dari desa-desa di Kabupaten Karangasem sebanyak 3 desa, Klungkung (12), Gianyar (32), Denpasar (5), Badung (1), Tabanan (17), Buleleng (26), dan Kabupaten Jembrana 10 desa. Sedangkan desa di Kabupaten Bangli belum satupun ada yang menyerahkan proposal.

Sedangkan dari total 2.530

subak dan subak abian yang berhak mendapat BKK, yang proposalnya sudah masuk baru 100 subak dan 83 subak abian. "Demikian juga untuk 102 desa pakraman yang seharusnya mendapatkan bantuan lewat mekanisme hibah, proposal yang masuk baru 63," katanya.

Di sisi lain, tambah Dewa Beratha, untuk pencairan dana BKK dan hibah untuk desa pakraman, subak dan subak abian, pihaknya juga harus berkoordinasi dengan SKPD terkait seperti Biro Hukum dan Keuangan.

"SK penetapan harus dikeluarkan oleh Biro Hukum. Walaupun proses administrasi pencairan datang dari desa, tetapi kalau SK penetapan belum diselesaikan, kami juga tidak bisa bekerja apa," katanya.

Tahun ini, setiap desa pakraman di Bali akan mendapatkan dana BKK dari Pemprov Bali sebesar Rp200 juta, sedangkan setiap subak (petani lahan sawah) dan subak abian (lahan kering) mendapatkan Rp50 juta. Yang akan mendapatkan BKK tersebut, total ada 1.488 desa pakraman dan 2.530 subak dan subak abian. **ant**



Sebelum Serah Terima, ✓ Proyek Kolam Renang Dievaluasi

SINGARAJA, NusaBali

Penyerahan pembangunan kolam renang di Jalan Pidada, wilayah Kelurahan Banyuasri, Singaraja tinggal beberapa hari lagi. Sebelum diserahkan, pekerjaan proyek bernilai miliaran rupiah itu akan dievaluasi. Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) agendakan evaluasi tersebut, Jumat (7/8) pagi ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan (Disdik) Buleleng, I Made Astika, Kamis (6/8) mengatakan, pekerjaan kolam renang sebagai salah satu venue ajang Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Bali ke XII, sudah seratus persen. Pihak rekanan akan serahkan proyek tersebut dua hari lagi yakni tanggal 10 Agustus. "Sebelum diserahkan, kita sudah agendakan turun ke lokasi untuk evaluasi seluruh kegiatan," katanya.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan persentase termasuk kualitas masing-masing unit kegiatan tersebut. Sehingga, pekerjaan yang diserahkan tersebut

sudah sesuai dengan spek dalam kontrak kerja. "Nanti PPHP yang lakukan evaluasi, tidak ada tim independent," ujarnya.

Kolam tersebut dibangun di atas lahan seluas hampir 1 hektare, dengan dana mencapai hampir Rp 10 miliar. Sesuai kontrak, pembangunan kolam renang tersebut sudah diserahkan pada Pemkab Buleleng tanggal 10 Agustus nanti.

Ada dua kolam di lokasi tersebut dengan posisi bersebelahan. Satu kolam merupakan kolam pacu atau kolam prestasi standar nasional, dengan panjang 50 meter dan lebar 25 meter dengan kedalaman 180 meter. Sedangkan kolam satunya merupakan kolam pemanasan sebelum berlomba dengan panjang hanya 25 meter, lebar 15 meter dan kedalaman hanya 80 meter. Selain dua unit kolam, sarana lainnya sebagai pelengkap juga dibangun yakni ruang ganti.

Pantauan ke lokasi Jumat (31/7), pekerja tinggal menuntaskan pemasangan keramik di bagian bibir atas kolam. Sedang kolamnya

sendiri sudah mulai diisi air sejak dua hari. Diperkirakan kolam baru penuh dengan air dalam dua atau tiga hari lagi. Air diambilkan dari dua sumber yakni dari pasokan PDAM dan sumur bor yang ada di lokasi. Pekerja juga terlihat tinggal memasang pintu di ruang ganti.

Sementara Kadis DKP, Nyoman Genep yang dikonfirmasi mengaku pihaknya sudah menyiapkan sejumlah tanaman hias untuk penataan taman di lokasi kolam renang. Dikatakan, penataan taman di lokasi akan dilakukan setelah proyek itu diserahkan kepada pemerintah. "Sudah kami siapkan tanaman dalam pot di kantor, tapi kami baru bisa tempatkan tanam itu setelah proyek itu bersih dan sudah penyerahan," katanya.

Genep juga mengatakan, pihaknya sudah membersihkan lokasi di sisi timur dekat Tukad Banyumala dari semak-semak belukar. Rencananya, pihaknya kembali adakan bersih-bersih dilokasi pada hari Minggu besok. **k19**

Edisi : Jumat, 7 Agustus 2015

Hal : 4



Usaha Rafting Ilegal

Masih Marak

★ Tetap Kena Pungutan Retribusi

Pihak Pemkab belum bisa lakukan penertiban perizinan usaha rafting karena kewenangan mengeluarkan izin masih dalam peralihan dari Provinsi Bali ke Kabupaten Karangasem.



SUASANA rafting di Objek Sungai Telaga Waja dimana sejumlah usaha belum kantong izin. • NUSABALI/NANTRA

AMLAPURA, NusaBali

Usaha jasa wisata arung jeram atau rafting yang melakukan kegiatannya di Sungai Telaga Waja, di jalur Desa Rendang (Kecamatan Rendang) menuju Desa

Tangkup (Kecamatan Sidemen) Karangasem diketahui beberapa di antaranya masih ilegal atau tak mengantongi izin. Sementara dari 13 usaha rafting resmi yang ada, telah tutup dua hingga tinggal 11 usaha wisata rafting.

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Karangasem I Wayan Purna mengakui masih ada beberapa usaha rafting tanpa izin ini saat ditemui di Amlapura, Kamis (6/8). Menurutnya, belum kiranya menyang-

kut perizinan usaha rafting di Objek Wisata Sungai Telaga Waja menurut Purna, karena kewenangan mengeluarkan izin masih dalam peralihan.

Sebelumnya yang mengeluarkan izin jadi kewenangan Provinsi Bali, kali ini Provinsi Bali melimpahkan ke Kabupaten Karangasem. "Masa peralihan itulah, belum memungkinkan agar semua usaha rafting mengantongi izin. Kami juga telah melakukan koordinasi ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selanjutnya menyosialisasikan hasil kunjungannya itu," katanya.

Purna mengakui Objek Sungai Telaga Waja, satu-satunya memiliki daya tarik wisata dalam hal berwisata rafting, dengan air jernih, langsung keluar dari 6 mata air, dan cukup deras. "Hanya saja, ke depan tengah melakukan penertiban menyangkut perizinan, karena tidak semua usaha mengantongi izin, sehingga kesulitan menagih

retribusi," tambah Purna.

Sementara itu, lain hal dengan Dinas Pendapatan (Dispenda) Karangasem yang sepertinya tidak terlalu ambil pusing atau memperlumahkan adanya usaha rafting tanpa izin, asalkan tetap bayar retribusi. Kadispenda I Nengah Toya, mengaku tidak masalah soal izin. "Terpenting usaha rafting bersedia bayar retribusi," kata I Nengah Toya.

Dia menambahkan, usaha rafting satu paket dengan retribusi olahraga, sehingga jadi pos pendapatan, retribusi rekreasi dan olahraga. Target terpasang di APBD 2015 Rp 1,2 miliar, sementara tercapai sekitar 43 persen.

Terlebih lagi belakangan wisatawan yang menikmati wisata rafting terus berdatangan. Wisatawan asing bayar retribusi per orang Rp 20.000, dan wisatawan domestik per orang Rp 10.000. Mengenai tarif per wisatawan tergantung usaha rafting masing-masing. k16